

BAB II

DINAMIKA PEMERINTAHAN MESIR DI ERA- HOSNI MUBARAK

Sistem Pemerintahan Mesir adalah republik dengan presiden sebagai kepala negaranya. Berdasarkan Piagam Nasional 1962 dan Konstitusi 1971, Mesir merupakan sebuah negara yang berbentuk sosialis demokratis yang disebut Republik Arab Mesir. Dalam Piagam Nasional 1962 dikatakan bahwa tujuan Republik Mesir adalah kemerdekaan, sosialisme, dan kesatuan Arab. Sedangkan konstitusi menetapkan struktur resmi dalam pemerintahan Mesir, yakni presiden, kabinet, badan legislatif, dan pengadilan.¹²

Dalam hukum konstitusi Mesir, Presiden didukung oleh minimal dua pertiga anggota legislatif kemudian harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas para pemilih. Presiden memiliki masa bakti yang tidak terbatas, sehingga Presiden bebas berkuasa sampai kapanpun. Satu masa bakti atau periode kepemimpinan Presiden adalah enam tahun. Presiden bebas mengangkat seorang Wakil Presiden ataupun Perdana Menteri serta anggota kabinetnya, selain itu Presiden juga dengan leluasa dapat memberhentikan mereka.

Tugas anggota kabinet adalah membantu presiden dalam merencanakan dan mengarahkan kebijaksanaan. Untuk badan legislatif, Mesir memiliki sebuah lembaga bernama Majelis Rakyat atau *Majlis Al-Sya'ab* yang separuh dari

¹² Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Encyclopedia Indonesia*, Seri Cakrawala, PT. Intermedia, Jakarta

anggotanya haruslah seorang pekerja atau petani. Masa bakti dalam satu periode adalah enam tahun. Pemilih dapat memilih 448 anggota, sedangkan presiden dapat mengangkat 10 anggota majelis. Rakyat yang boleh ikut serta dalam pemilihan umum adalah warganegara Mesir yang berusia 18 tahun ke atas.

A. Sejarah Singkat Pemerintahan Mesir

Mesir merupakan negara yang awal terbentuknya di kuasai oleh militer, sehingga menjadi pemerintahan di Mesir lebih bersifat otoriter. Mesir telah mencatat dalam sejarahnya adanya kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Dimana aktor yang paling berperan dalam melakukan kudeta ialah militer. Dalam perjalanan pemerintahannya Mesir selama 60 tahun dipimpin oleh militer. Militer di Mesir mempunyai peran dan pengaruh yang cukup signifikan dalam berlangsungnya pemerintahan. Peran militer dari setiap pemerintah yang berkuasa tentunya berbeda-beda, begitupun dengan kudeta militer yang terjadi.

Adapun sejarah singkat yang dijabarkan dimulai pada 1919. Pada tahun 1919 terjadi revolusi pertama yang dilakukan oleh rakyat Mesir untuk menentang Inggris. Sampai pada akhirnya pada 1922 Inggris memerdekakan Mesir. Bentuk pemerintahannya saat itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Fuad.¹³

Pada tahun 1952, Mesir mengalami revolusi keduanya. Kali ini rakyat meminta Raja Farouk untuk turun dari tahtanya karena keadaan Mesir saat itu

¹³ D. J. F. ... (1999) hal. 160

cukup terpuruk. Hal ini ditandai dengan ketidakbebasan rakyat untuk menyuarakan pendapat sehingga menyebabkan merosotnya ekonomi Mesir serta rusaknya kehidupan sosial.

Militer Mesir kemudian mengambil alih kekuasaan pada masa kepemimpinan Raja Farouk. Pada bulan Juli 1952, yaitu melalui sebuah kudeta yang didukung oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menggulingkan Raja Farouk, yang dianggap merupakan boneka Inggris. Proyek CIA telah digambarkan oleh Miles Copeland, seorang agen CIA pada tahun 1970 dalam bukunya *'The Game of Nations'*, dan kemudian dalam memoarnya pada tahun 1989, *"The Game of Player."* Gerakan Perwira Merdeka (*Free Officers Movement*), yang merupakan sekelompok perwira militer yang umumnya masih muda, membentuk sistem politik baru yang menjadikan militer menjadi institusi paling terorganisir dan paling penting di negeri tersebut.

Pada tahun 1956, Gamal Abdul Nasser mengambil peran sebagai presiden Mesir. Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez, yang menyebabkan perang dengan Inggris, Prancis, dan Israel dan dalam proses selanjutnya menjadikan Gamal Abdul Nasser sebagai pahlawan nasional yang meningkatkan reputasinya di dunia Arab yang lebih luas. Kekalahan terhadap Israel dalam perang enam hari tahun 1967 menyebabkan keputusan oleh kepemimpinan militer untuk menjauhkan diri dari pemerintahan harian yang sesungguhnya, dengan meninggalkan urusan ini di tangan kepemimpinan sipil, sambil menjaga agar kebijakan luar negeri, pertahanan dan anggaran nasional secara tegas tetap di

bawah kendalinya. Sampai saat ini, promosi untuk jajaran senior militer hanya dilakukan setelah pemeriksaan yang ketat dari kecenderungan politik dan kecenderungan Islam.

Setelah wafatnya Gamal Abdul Nasser, maka pemerintahan mesir dipimpin oleh Anwar Sadat, Anwar Sadat memulai kepemimpinannya pada bulan September 1970, hingga Akhirnya Anwar Sadat menemui ajalnya pada 6 Oktober 1981. Dia ditembak mati ketika perbarisan ketenteraan oleh ahli tentera yang merupakan sebagian daripada jihad islam Mesir yang menentang perjanjiannya dengan Israel dan juga tindakan kejahannya.

Kemudian pemerintahan Mesir dipimpin oleh Hosni Mubarak, Presiden yang tidak kalah otoriternya dari pemerintahan sebelumnya. Hosni Mubarak memimpin Mesir selama 30 tahun, sebelum di gulingkan pada 25 Februari 2011. Sejak masa pemerintahan Mubarak, rakyat Mesir mengalami tekanan dan kekangan dalam bertindak dengan otoritas penuh. Mubarak sebagai seorang pemimpin, diperparah dengan makin tingginya tingkat korupsi di pemerintahan yang dilakakukan demi kepentingan pribadi maupun golongannya. Dengan semakin merajalelanya korupsi di pemerintahan Hosni Mubarak, maka tingkat kesejahteraan rakyat yang berada di luar lingkaran kekuasaan dalam rezim Mubarak sangat rendah, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Mesir sangat tinggi. Keresahan dan prustasi sosial di Mesir terhadap tingginya angka

Mubarak, ini merupakan bentuk dari kegagalan Mubarak dalam menciptakan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Mesir.

Kebijakan pasar bebas dan ideologi neoliberal yang dianut rezim Mubarak merupakan bencana bagi rakyat Mesir, hal ini menyebabkan ketahanan ekonomi Mesir menjadi kian rapuh, dikerenakan pemerintahan Mubarak dan semua pengikutnya yang duduk di pemerintahan lebih mendengar AS dan Israel dari pada rakyat Mesir itu sendiri. Hingga akhirnya Mubarak lengser dari kekuasaannya akibat amaranan rakyat yang begitu besar melalui demonstrasi besar-besarn yang dilakukan selama 18 hari.¹⁴ Dalam jatuhnya rezim Hosni Mubarak ini tidak dipungkiri adanya peran serta Militer Mesir, Sehingga pengaruh Militer terhadap pemerintahan di Mesir begitu kuat.

Di samping itu, Militer melalui Organisasi Proyek Pelayanan Nasional Mesir ikut andil untuk pengembangan industri dan mendominasi perekonomian Mesir melalui berbagai usaha patungan baik dengan perusahaan manufaktur domestik maupun internasional. Militer juga terlibat dalam sektor industri dan jasa, termasuk senjata, elektronik, produk konsumen, pembangunan infrastruktur, agribisnis, penerbangan, pariwisata dan keamanan.

Sebagian besar gubernur daerah di Mesir adalah para pensiunan perwira tentara. Banyak institusi sipil yang besar dan perusahaan-perusahaan di sektor publik yang dijalankan oleh para mantan jenderal. Tiga otoritas pengembangan

¹⁴ Vibizmanagement, *Kepemimpinan Hosni Mubarak*.

lahan negara (pertanian, perkotaan dan pariwisata) dipimpin oleh para mantan perwira militer. Tentara sangat terlibat dalam perekonomian nasional. Menurut beberapa perkiraan, sebanyak 40% perekonomian Mesir dikendalikan oleh militer dan mereka akan punya alasan yang jelas untuk mempertahankan posisi tersebut.

Militer Mesir telah memainkan peran sentral dalam melindungi kepentingan AS di wilayah tersebut. Sejak kudeta militer pada tahun 1952, AS telah memanjakan militer Mesir dengan bantuan lebih dari \$ 30 miliar.¹⁵ Bantuan AS ini sesungguhnya merupakan dana jaminan untuk menjaga keseimbangan regional, dimana para pemimpin militer Mesir sangat senang untuk melaksanakannya.

Pemimpin pertahanan negara Mesir saat ini adalah Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, seorang perwira militer alumnus US Army War College di Pennsylvania. Lebih dari 500 perwira militer Mesir mendapat pelatihan dan lulusan di sekolah militer Amerika setiap tahun. Bahkan ada rumah khusus di barat laut Washington DC, di mana para pejabat militer Mesir yang berkunjung mendapatkan tempat tinggal ketika berada di ibukota Amerika. Perjanjian damai dengan Israel, yang ditandatangani pada tahun 1979 di bawah sponsor AS, adalah dasar keseimbangan kekuasaan regional. Hal ini mengakhiri perang dengan Israel, dan memilih Sinai sebagai zona penyangga demiliterisasi antara kedua negara, yang secara efektif

¹⁵ National Geographics. *Egypt morsi government overthrow military revolution independence history*. <http://news.nationalgeographic.com/news/2013/07/130705-egypt-morsi-government->

menghilangkan ancaman perang negara dengan negara, dan dengan demikian memperkuat Israel.

Peran militer di Mesir telah memastikan tidak ada lembaga saingan lainnya yang pernah bisa berkembang. Akibatnya, sebagian besar lembaga negara melakukan korupsi atau menjalankan kronisme. Dengan sektor perekonomian yang hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan karir di militer merupakan satu-satunya cara agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi ekonomi yang buruk. Sementara para personil militer direkrut dari desa-desa dan kota-kota di seluruh negeri, hanya ada sembilan posisi perwira. Akibatnya, mencapai posisi senior di jajaran militer Mesir berubah menjadi lahan bagi siapa yang anda kenal. Arsitektur ini membantu pimpinan militer Mesir untuk mempertahankan loyalitasnya dalam jajaran militer, karena hanya perwira yang mendapat pelatihan di AS saja yang bisa tersaring dengan hati-hati sehingga dapat mencapai posisi senior.

B. Dinamika Sosial-Ekonomi dan Politik Mesir pada Masa Pemerintahan Hosni Mubarak

Hosni Mubarak menjadi presiden Mesir menggantikan Anwar Sadat yang wafat dibunuh kelompok militer radikal. Masa pertama kepemimpinannya, Mubarak menjalankan pemerintahan dengan melanjutkan kebijakan-kebijakan Anwar Sadat. Beberapa diantaranya adalah dengan berusaha memperbaiki

perekonomian Mesir yang semakin memburuk, melanjutkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Kemudian ia juga memperbaiki hubungan dengan Uni Soviet dengan cara meningkatkan kunjungan pejabat tinggi kedua negara.

Mesir mengalami era pemerintahan yang sulit ketika di pimpin oleh Hosni Mubarak. Sejak awal kenaikannya menjadi presiden sudah terdapat struktur pemerintah yang berbeda dari sebelumnya. Ketika Anwar Sadat menjabat sebagai presiden, Hosni Mubarak menjabat sebagai wakil presiden. Tetapi di masa kepemimpinan Hosni Mubarak, kursi kepemimpinan wakil presiden di biarkan kosong. Hal inilah yang menimbulkan spekulasi bahwa tidak ada calon pengganti yang jelas bagi Mubarak jika ia tidak lagi menjabat.

Pada tahun pertama masa pemerintahannya, Mubarak sudah menghadapi tekanan dari dalam negeri terutama dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang sangat kritis terhadap proses perdamaian Mesir-Israel yang dianggap sebagai “penjualan” martabat bangsa Mesir. Kemudian kemerosotan ekonomi Mesir yang makin parah dari tahun ke tahun merubah citra Hosni Mubarak di mata masyarakat Mesir dimana Mubarak yang awalnya di anggap sebagai pemimpin yang hati-hati telah berubah menjadi sosok pemimpin yang dicemooh masyarakat Mesir.

Hosni Mubarak sosok yang menjabat sebagai presiden Mesir paling lama sepanjang sejarah. Menjadi pemimpin tunggal tanpa adanya seorang wakil telah menjadikan Hosni Mubarak sebagai pemimpin yang radikal dan memerintah

1. Hosni Mubarak memiliki kelargasan yang luas atas Mesir dibawah konstitusi

1971. Ia berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1987, 1993, 1999 dan 2005. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan masa bakti presiden Mesir selama satu periode yaitu enam tahun. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa Mesir tidak ada batasan terhadap presiden dalam menduduki jabatannya. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Hosni Mubarak untuk mempertahankan masa jabatannya.

1. Sosial – Ekonomi

Kondisi Sosial-Ekonomi Mesir cukup mengkhawatirkan ketika dipimpin oleh Hosni Mubarak, melihat banyaknya pengangguran yang ada di Mesir. Banyaknya pengangguran tersebut menjadi salah satu penyebab lemahnya perekonomian di Mesir. Pada tahun 2005 Masih banyak kaum muda terdidik yang belum mendapatkan pekerjaan. Mesir hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 4% per tahun.

Selain kemiskinan dan pengangguran, praktek-praktek korupsi juga banyak terjadi di pemerintah. Seperti korupsi yang terjadi dalam Kementerian Dalam Negeri Mubarak yang meningkat secara dramatis sebagai akibat legitimasi sistem kelembagaan yang diperlukan untuk memperpanjang kekuasaan presiden. Surat kabar di Inggris "*The Guardian*" mengutip dari sumber-sumber di Timur Tengah bahwa kekayaan Mubarak berkisar antara \$ 40-70 Milliar¹⁶. Meskipun Mubarak adalah seorang militer, bukan seorang pengusaha yang bekerja

¹⁶ Hizbut Tahrir. *Ternyata Mubarak Penjahar Terkaya di Dunia*,

mengumpulkan harta, namun karena ia mendominasi penuh di Mesir selama jangka waktu tiga puluh tahun dengan konstitusi di tangannya, telah menjadikannya diktator dan angkuh yang memberi peluang bagi dirinya untuk menjarah sebagian besar kekayaan negara.

Pada tahun 2010, *Tranparency International* mengeluarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi Mesir dengan skor 3,1. Berdasarkan persepsi tingkat korupsi dari orang-orang bisnis dan analisa negara, dengan skor 10 sebagai angka yang menunjukkan bersih dari korup dan 0 sebagai angka yang menunjukkan secara total korup. Laporan tersebut telah menunjukkan bahwa praktek korupsi yang terjadi di Mesir hampir berada dalam tingkat yang paling buruk¹⁷.

Perekonomian Mesir sangat terpusat pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat. Hal tersebut juga dilanjutkan oleh pemerintahan Hosni Mubarak. Tahun 2004-2008 Hosni Mubarak melakukan reformasi ekonomi yang agresif untuk menarik investasi asing dan memfasilitasi pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*), tetapi reformasi ekonomi sempat tertunda karena gejolak ekonomi global. Secara internasional penurunan ekonomi Mesir melambat dengan pertumbuhan PDB menjadi 4,5% tahun 2009.¹⁸ Artinya, Hosni Mubarak telah membuat sebuah perubahan terhadap kebijakan ekonomi Mesir yang awalnya bersifat terpusat menjadi lebih terbuka untuk mendongkrak perekonomian Mesir.

¹⁷ David Held. *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Komunitalan*. Pusat Pelajar. Jakarta, 2004, hal. 167

Perekonomian Mesir bergantung kepada sektor pertanian, media, ekspor minyak bumi dan pariwisata. Pendapatan utamanya berasal dari wisata serta lalu lintas yang melewati Terusan Suez. Namun ada juga penduduk Mesir yang bekerja di luar negeri terutama di Arab Saudi, Teluk Persia dan Eropa. Banyaknya penduduk Mesir yang bekerja di luar negeri disebabkan oleh tidak adanya jaminan kemakmuran yang akan diperoleh masyarakat karena hanya mengandalkan ketergantungan kepada Sungai Nil. Kemudian ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi yang pesat memiliki dampak terhadap keterbatasan lahan pertanian.

Sejak tahun 1979, Mesir menjadi negara terbesar ketiga yang menerima bantuan dari Amerika Serikat, yaitu sekitar \$ 2,2 Miliar per tahunnya. Walaupun demikian, rakyat Mesir belum mampu menikmati perekonomian Mesir. Pemerintah menetapkan harga barang terutama harga barang-barang pokok dengan standar tinggi, sedangkan perekonomian masyarakat Mesir masih berada dalam kemiskinan dengan daya beli yang relatif rendah. Pada akhir tahun 2010 sekitar 80 juta jiwa penduduk Mesir hanya memiliki pendapatan per kapita \$ 2 per hari¹⁹.

¹⁹ Apriadi Tamburaka. Op Cit, hal. 69-70

2. Politik

Selama 30 tahun berkuasa, stabilitas politik pada pemerintahan Hosni Mubarak menjadi kacau akibat tidak adanya kebebasan berpolitik yang diterapkan oleh Hosni Mubarak. Di sisi lain disetiap pos pemerintahan, baik parlemen maupun kabinet, selalu berhasil dikuasai oleh Mubarak. Hal ini membuat pendidikan politik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Munculnya satu partai dominan yang memenangkan pemilu selama 30 tahun menjadi salah satu bukti kacaunya stabilitas politik pada masa pemerintahan Hosni Mubarak. Melalui NDP (*National Democratic Party*) Mubarak berhasil mengendalikan perpolitikan Mesir yang melahirkan hasil kemenangan pemilu selama beberapa periode. Dalam setiap pemilu yang pernah dilaksanakan, hampir dipastikan kemenangan akan diraih oleh NDP yang diketuai oleh Hosni Mubarak. Hal tersebut terjadi karena banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Hosni Mubarak demi memenangkan pemilu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Mubarak adalah dengan mengintimidasi pendukung oposisi agar memilih Mubarak sebagai presiden²⁰.

Sifat haus kekuasaan yang dimiliki oleh Hosni Mubarak membuat Hosni Mubarak tidak ingin posisinya terancam. Ia menggunakan segala cara agar tetap menjabat sebagai presiden Mesir. Hukum dan aparat negara ia manfaatkan untuk menindas lawan-lawan politiknya. Sebagai imbalannya, aparat penegak hukum diberikan jalan untuk melakukan korupsi. Hal tersebut tidak hanya berdampak

kepada lawan politiknya saja, tetapi juga kepada rakyat. Rakyat yang lemah akan semakin lemah dan yang kuat semakin kuat²¹. Selain itu Mubarak juga menerapkan kebijakan Undang-Undang *Security Act* yang berisi bahwa pemerintah berhak menangkap siapa saja tanpa proses hukum²². Kebijakan inilah yang menjadikan Mubarak semakin mudah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Pihak manapun yang berani menentang Hosni Mubarak dapat dihukum secara legal oleh pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang *Security Act*.

Kekuasaan yang diperoleh oleh Hosni Mubarak telah membuatnya lupa pada kewajibannya sendiri sebagai seorang presiden. Ia justru disibukkan dengan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaannya. Perbaikan ekonomi yang ia janjikan di awal kenaikannya justru tidak tercapai, tetapi justru praktek korupsi yang ia “legalkan” kepada aparat pendukungnya berdampak kepada perekonomian masyarakat yang semakin menurun dan tidak berkembang.

Dalam pemerintahannya, Hosni Mubarak menjalankan tiga fungsinya sebagai presiden, yaitu mensejahterakan masyarakat Mesir, menjaga kepentingan Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah sesuai dengan Perjanjian *Camp David*²³. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian perdamaian antara Israel dengan Mesir setelah perang tahun 1967 dan 1973. Sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Camp David tahun 1978, baik Israel dan Mesir menerima miliaran

²¹ Fuad Bawazier. “Revolusi Mesir: Pergantian Sistem”. Majalah *Republika*. 14 Februari 2011. hal. 2

²² Sammy Abdullah. “Elbaradei Pun Pulang”. Majalah *Republika*. 1 Februari 2011. hal. 2

²³ Agus N. Cahyo. 2011. *Tokoh Timur Tengah yang Diam-diam Jadi Antek Amerika Serikat dan Sekutunya*. DIVA Press. Jogjakarta, hal. 159

dolar bantuan setiap tahunnya dari Amerika Serikat. Bantuan tersebut difokuskan terhadap bantuan militer terutama bagi Mesir disamping untuk pembangunan.²⁴

Hubungan baik antara Mesir, Israel dan Amerika Serikat tak jarang mendapat protes dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Tetapi luasnya kekuasaan Hosni Mubarak yang seakan tidak terbatas dan tidak mungkin untuk dilawan oleh berbagai oposisi, masyarakat dan terutama Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam anti barat yang didirikan di Ismalia oleh Shaikh Hassan al-Banna pada tahun 1929²⁵. Ikhwanul Muslimin memiliki pengikut yang besar sejak awal berdirinya, bahkan pengaruhnya sampai menembus ke luar wilayah Mesir. Pada mulanya organisasi ini sangat menarik bagi golongan rendah yang serba kekurangan, tetapi lambat laun gerakan ini menyebar kepada kaum intelektual dan beberapa pemimpin yang memiliki pengaruh besar. Pada tahun 1952, Ikhwanul Muslimin bergabung dengan militer Mesir berhasil menggulingkan Raja Faruq yang menjadi boneka kerajaan Inggris.

Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan muslim terbesar di Mesir dan Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin menilai bahwa hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya Israel telah memberikan dampak buruk terhadap dunia Islam. Sebagai organisasi Islam yang moderat, Ikhwanul Muslimin tidak hanya bergerak di bidang agama tetapi juga di bidang politik. Selama rezim otoriter Hosni Mubarak

berjalan, organisasi ini terus mengawasi tingkah laku Hosni Mubarak melalui kursi parlemen yang diduduki beberapa anggota kelompoknya.

Keberadaan Ikhwanul Muslimin pada dasarnya sudah menjadi ancaman bagi pemimpin-pemimpin Mesir sejak kepemimpinan Gamal Abdul Nasser. Hal itu terjadi karena dari Naser hingga Mubarak merupakan pemimpin yang menjaga kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah terutama Mesir. Oleh karena itu organisasi ini dianggap tidak sah oleh kepemimpinan Naser dan juga Mubarak. Walaupun secara legalitas keberadaan organisasi ini tidak diakui, Ikhwanul Muslimin berhasil mencuri perhatian masyarakat dengan menunjukkan bahwa mereka mampu memperoleh legitimasi dan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan misinya, Ikhwanul Muslimin bekerja melalui organisasi-organisasi yang sah di Mesir²⁶

Kelompok Islam di Mesir terbagi dua, yaitu Islam Radikal dan Islam Moderat. Kelompok islam radikal adalah kelompok islam Al-Jihad, sedangkan kelompok islam moderat adalah kelompok islam Ikhwanul Muslimin. Kelompok islam radikal dalam hal ini berupaya berupaya menggoyahkan rezim pemerintah dengan cara mengacaukan stabilitas sosial seperti yang dilakukan oleh kelompok islam moderat yang berupaya dengan militan islam dalam merebut kekuasaan di Mesir²⁷.

Jumlah anggota kelompok islam radikal ini semakin bertambah, ketika Mubarak berupaya menekan pergerakan Al-Jihad tersebut. Hal itu disebabkan oleh ketidakmampuan Hosni Mubarak dalam merangkul rakyat kelas menengah kebawah. Kelompok islam radikal ini muncul disebabkan oleh kemerosotan ekonomi, mundurnya legitimasi dan otoritas Mesir²⁸.

Ketika ketegangan antara kelompok islam radikal dengan Hosni Mubarak semakin memuncak, Ikhwanul Muslimin muncul memanfaatkan ketegangan tersebut dengan berusaha mengambil perhatian Hosni Mubarak dengan suara dan aspirasi dari kelompok moderat yang mereka bawa. Hasilnya, Hosni Mubarak memberikan ruang gerak bagi Ikhwanul Muslimin dalam menyampaikan aspirasinya. Dengan memberikan ruang gerak bagi Ikhwanul Muslimin tersebut, pemerintah dapat bekerjasama untuk mengentikan perkembangan kelompok islam radikal. Namun Mubarak membatasi pergerakan Ikhwanul Muslimin agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut. Kelompok Ikhwanul Muslimin lebih menunjukkan eksistensinya di bidang agama, baik secara moderat maupun secara militan²⁹.

Ruang gerak politik yang diberikan oleh Hosni Mubarak kepada Ikhwanul Muslimin justru memberikan dampak buruk bagi Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Setelah berhasil mencuri perhatian masyarakat Mesir, Hosni Mubarak menganggap bahwa keberadaan dan eksistensi Ikhwanul Muslimin justru mengancam kekuasaan politik Mubarak. Oleh karena itu, Hosni Mubarak

menangkap dan mengadili para anggota Ikhwanul Muslimin yang dianggap melawan pemerintah. Penangkapan tanpa sebab yang dilakukan oleh Mubarak kepada ribuan aktivis Ikhwanul Muslimin membuat Ikhwanul Muslimin ikut berperan aktif dalam demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan rezim Hosni Mubarak.

C. Kondisi Militer Mesir Era Hosni Mubarak

1. Peran Militer dalam Sektor Politik

Hosni Mubarak merupakan presiden keempat Mesir, menggantikan Anwar Sadat yang tewas terbunuh oleh seorang letnan militer di negara tersebut. Berbeda dengan Anwar Sadat, Hosni Mubarak cenderung memisahkan dan membatasi keterlibatan militer di dalam politik, Hosni Mubarak yang juga datang dari latar belakang militer justru merangkul institusi tersebut dan memberikan mereka tempat dalam ranah sipil Mesir. Petinggi militer menempati 10% persen dari pos kementerian di Mesir.

Di samping itu, sebagian besar dari Gubernur di Mesir adalah pejabat senior dalam lingkungan militer dan polisi. Dalam mencapai jabatannya, mereka harus rela untuk menanggalkan karir kemiliterannya. Namun demikian, mereka tetap terintegrasi dengan militer. Peranan Gubernur di sini cukup jelas, yaitu

pada aktivitas yang merusak control politik, yang berpotensi meruntuhkan tabir demokrasi Mesir, atau (paling buruk) memperkuat institusi politik

Mencermati lebih dalam mengenai peranan kaum militer, Abdul Halim Abu Ghazala adalah sang menteri pertahanan atau orang yang berpengaruh dalam pemerintahan Mesir pada masa awal pemerintahan Hosni Mubarak, Abu Ghazala juga bisa disebut sebagai menteri yang paling berpengaruh dibanding 34 menteri anggota kabinet Mesir saat itu. Abu Ghazala memiliki kesamaan pandangan dengan Mubarak dimana keduanya meyakini bahwa militer mampu memainkan peranan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.³⁰ Dalam perjalanan karirnya, Abu Ghazala juga merupakan orang yang cukup dekat dengan Amerika Serikat. Berbagai lobi dilakukannya untuk mendapatkan hutang bagi militer dan investasi di Mesir. Ghazala juga sempat diusulkan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Mubarak.

Sebagai Menteri Pertahanan, Ghazala cukup berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan mengenai militer di Mesir. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan berbagai presentasi yang dilakukannya mengenai keamanan nasional dan masa depan militer Mesir kepada partai berkuasa – Partai NDP. Contohnya pada Juli 1976, Ghazala menyampaikan statement komprehensif pada NDP mengenai pembangunan politik dan militer di Timur Tengah serta pengaruhnya bagi Mesir. Untuk itu, dia menyarankan modernisasi militer Mesir

³⁰ Robert B. Satloff, *Army and Politics in Mubarak's Egypt*, 1988, The Washington Institute for Near East Policy, Washington D. C., Hal. 15-16.

dengan membeli alutsista baru. Namun pada akhirnya Mubarak menghapus Abu Ghazala pada tahun 1987 dari jajaran pemerintahan dalam upaya untuk mendepolitisasi angkatan bersenjata.

Secara gradual, militer mendapatkan lebih banyak kekuasaan dalam era Hosni Mubarak, dimana militer cenderung menjadi tumpuan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. Hal ini didukung dengan peningkatan tunjangan-tunjangan sosial kepada masyarakat dan memberikan akses ekonomi kepada militer yang dilakukan oleh Mubarak. Petinggi militer menempati sepuluh persen dari posisi kementerian di Mesir.

Pada tahun 1981, Mubarak memberlakukan Undang-undang Keadaan Darurat yang memberikan kewenangan kepada polisi dan militer, menanggukkan hak konstitusional warga negara, dan melegalkan sensor. Terkait undang-undang tersebut pemerintah Mesir menggunakannya untuk melawan pihak radikal seperti kelompok Islam fundamentalis yang memberikan ancaman pada stabilitas kepemimpinan di Mesir. Selain itu, pada awalnya, Mubarak secara bertahap mengenakan politik yang terkontrol. Ia memberbolehkan oposisi dan organisasi masyarakat mulai aktif dalam politik, namun di sisi lain, Mubarak juga memperbolehkan penangkapan aktor oposisi, dan secara tidak langsung menyingkirkan mereka dari kompetisi politik.

Semenjak diberlakukannya undang-undang Keadaan Darurat masyarakat Mesir merasa bahwa pemerintahan Mubarak telah mengekang kebebasan mereka

mengadili siapa saja pihak yang berpotensi mengancam kestabilan dan keamanan pemerintahan, entah itu kelompok Ikhwanul Muslimin maupun kelompok demonstran anti Mubarak. Di bawah undang-undang Keadaan Darurat para demonstran sering menerima aksi kekerasan yang dilancarkan oleh pihak aparat keamanan dalam serangkaian aksi demonstran yang memprotes pemerintahan Mubarak, selain itu undang-undang tersebut juga digunakan sebagai kontrol terhadap pihak oposisi, seperti Ikhwanul Muslimin, agar tidak dapat masuk ke dalam pemerintahan dan mengganggu kepemimpinan Hosni Mubarak.

Selain itu, fungsi awal militer Mesir sebagai penjaga keamanan, termasuk di dalamnya stabilitas internal, mulai beralih menjadi pelindung pemerintah yang berkuasa. Pemerintah juga cenderung lebih bergantung pada militer dalam kasus ancaman dalam bentuk internal, melibatkan personil militer dalam rapat-rapat Mubarak mengenai bagaimana mengontrol instabilitas domestik. Contohnya adalah, pada September 1984, dimana Mubarak menaikkan harga bahan pangan dan asuransi, sehingga mengakibatkan protes di Kufr al-Dawwar. Militer mengambil alih menghentikan kekacauan tersebut meskipun tanpa *deployment* tentara yang berlebihan, dan menunjukkan bahwa militer dominan di dalam negara, menekan peran kepolisian.³¹ Pada tahun 1986, sebanyak 20,000 anggota paramiliter Central Security Force yang sebagian besar terdiri dari petani yang berpendidikan rendah yang harus mengikuti wajib militer, menentang program

³¹ Robert B. Satloff, *Army and Politics in Mubarak's Egypt*, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 1988. hal. 15-16.

wajib militer tersebut. Militer lalu dipanggil pula untuk meredam pemberontakan ini.

2. Peranan Militer dalam Sektor Ekonomi

Era Hosni Mubarak merupakan era di mana militer mempunyai hak-hak yang sama dengan sipil, atau biasa disebut dengan dwi-fungsi militer. Hal ini tidak luput juga dalam bidang ekonomi yang juga turut dimasuki oleh pihak militer. Dalam era ini, militer diberi otonomi yang luas untuk membuat dan menjalankan industri bisnis militer. Militer Mesir telah demikian menjadi faktor kunci ekonomi sejak 1980-an, baik itu di sektor real estate, produksi peralatan rumah tangga, dan membuka tujuan wisata baru. Menurut perkiraan, kegiatan bisnis militer membentuk 20 persen dari output ekonomi tahunan negara itu

Pada masa pemerintahan Anwar Sadat adanya pemotongan anggaran belanja militer dan sangat membatasi peran dan keterlibatan militer dalam urusan publik dan politik, Hosni Mubarak justru sangat menyambut adanya kontribusi dan keikutsertaan militer dalam pembangunan ekonomi Mesir dan menjamin peranan militer sebagai penjamin stabilitas dalam negeri. Mubarak telah memberikan lampu hijau kepada militer untuk memperoleh bagian yang lebih dalam anggaran pengeluaran pemerintah.³² Militer juga diberikan keleluasaan untuk mengatur aktivitas pemerintah dalam pembangunan serta untuk

'Sayap ekonomi' yang dijalankan militer Mesir diawali dari pembentukan Organisasi Militer untuk Proyek Sipil pada 1981 yang terlibat dalam bermacam-macam pembangunan sarana publik seperti konstruksi jalan raya dan jembatan, jaringan telekomunikasi, dan proyek-proyek lainnya. Sejak saat itu, militer pada masa Mubarak terlibat dalam semua kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan jalur kereta api, *flyover*, kanal irigasi, saluran pipa jarak jauh, jaringan transportasi, serta pabrik-pabrik, laboratorium, klinik, dan pusat-pusat pelatihan.

Pengusaha bidang pertahanan dan non-pertahanan yang berjalan bersama-sama dapat disebut sebagai *Military Industrial Business Commercial Complex* (MIBCC). Di Mesir, MIBCC adalah "perusahaan komersial yang dikelola militer besar yang masuk ke setiap sudut masyarakat Mesir," memproduksi makanan (minyak zaitun, susu, roti dan air minum kemasan), semen dan bensin, kendaraan (Cherokee dan Wrangler), serta infrastruktur. Militer mengembangkan usaha ekonomi yang luas karena beberapa alasan. Pertama, mereka memiliki "kepentingan perusahaan" yang mereka harapkan negara untuk memenuhi: gaji tetap, perumahan yang layak dan tunjangan seperti pinjaman berbunga rendah dan fasilitas perbelanjaan khusus. Kedua, perusahaan militer cenderung lebih efisien dan efisien daripada sektor publik. Namun, mereka mungkin menghambat upaya negara untuk mencapai privatisasi dan liberalisasi ekonomi pada kesadaran bahwa perusahaan swasta lebih efisien dan produktif. Ketiga, hirarki militer mungkin

benar-benar percaya bahwa perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan citra mereka sendiri.³³

Industri Militer Kompleks Mesir sangat berbeda dari Amerika Serikat. Di AS komponen industri militer menghasilkan senjata dan perlengkapan untuk militer, tetapi adalah milik pribadi. Industri non-pertahanan bukan merupakan bagian dari kompleks. Namun di Mesir militer benar-benar memiliki beberapa pemasoknya. Selain itu militer juga memiliki banyak industri yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan seperti resor hotel. Masuknya militer dalam sektor ekonomi juga didukung oleh peran yang dijalankan oleh Menteri Pertahanan Abdul Halim Abu Ghazalah yang memiliki visi yang sama dengan Mubarak mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama dengan militer yang dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mubarak memberikan ruang bagi Abu Ghazalah untuk menjalankan proyek-proyek yang terbilang cukup ambisius, yang kebanyakan bukan bagian dari bidang-bidang yang biasa ditangani oleh Departemen Pertahanan. Abu Ghazalah memiliki otoritas untuk mengawasi rencana pembangunan nasional dan memimpin pihak militer untuk mengambil langkah yang berbeda dalam proses pembuatan kebijakan dalam negeri.³⁴

Pergeseran peran militer dalam masa pemerintahan Mubarak ini disebut oleh Robert Springbrong sebagai perluasan horisontal (*horizontal expansion*)

³³ A. Hachimi, 'The Egyptian Military: past, present, future', Middle East Policy, Vol.

dalam peran militer di suatu negara. Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan hal ini untuk terjadi di Mesir.³⁵ 1) adanya rasa percaya bahwa sifat-sifat organisasional dalam militer yang kuat dapat menjadi penggerak yang efektif bagi usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; 2) kedekatan Presiden Mubarak dengan pihak militer; 3) potensi untuk mengurangi pengeluaran untuk pembangunan karena gaji tentara yang rendah, kepemilikan alat berat, dan sumber daya manusia yang memadai; dan 4) adanya kebutuhan untuk menurunkan sejumlah besar tentara dalam kegiatan yang produktif ketika kebutuhan akan pertahanan sedang berada dalam level yang rendah.

D. Revolusi Mesir Tahun 2011

Revolusi Mesir dipicu oleh tindakan pihak sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian Mesir terhadap seorang *blogger* yang bernama Khaled Said. Pada tanggal 6 Februari 2010 Khaled Said disiksa aparat kepolisian sampai akhirnya ia tewas mengenaskan karena ia ketahuan mengunduh video yang memperlihatkan polisi sedang membagi-bagikan mariyuana hasil penyitaan di lapangan. Kematian Khaled Said tersebut mendapat reaksi keras dari pengguna internet lainnya. Saat itu Wael Ghonim menjadi penggerak masa melalui akun sosial media *Facebook*.

³⁵ The Role of the Egyptian Military in Domestic Society,

Menanggapi tindakan keras yang berujung pada kematian Khaled Said, masyarakat Mesir terutama kaum muda gencar menyerukan aksi protes melalui jaringan internet dan media sosial. Ghonim membuat sebuah akun Facebook bernama "*My Name Is Khaled Said*". Namun karena alasan yang tidak jelas, Facebook memberangus akun tersebut. Namun beberapa saat berselang, Ghonim yang memiliki nama maya ElShaheed membuat grup akun facebook bernama "*We Are All Khaled Said*".³⁶ Ghonim berpendapat bahwa revolusi kaum muda melalui internet juga merupakan revolusi bagi seluruh rakyat Mesir. Ghonim mengunggah foto-foto Khaled Said dalam halaman facebook tersebut. Dalam sekejap, anggota grup tersebut menjadi 450.000. Melalui grup "*We Are All Khaled Said*" itu pula Ghonim merencanakan demonstrasi pada tanggal 25 Januari.

Aksi yang dilakukan oleh Ghonim tidak hanya menginspirasi kaum muda, tetapi juga warga Mesir yang sudah mapan seperti Afaf Naged, mantan anggota komisaris Bank Nasional Mesir³⁷. Hal ini semakin menambah dukungan yang luas dari masyarakat Mesir dan memobilisasi pergerakan turun ke jalan pada tanggal 25 Januari 2011. Keterlibatan Ghonim membuatnya dibekuk aparat. Pada tanggal 27 Januari 2011, Ghonim dinyatakan hilang saat gelombang demonstrasi di Mesir yang semakin memuncak. Akhirnya muncul laporan bahwa Ghonim di tahan polisi Kairo setelah ketahuan terlibat dalam gerakan anti Mubarak lewat internet

Selain Ghonim, Asmaa Mahfouz menjadi tokoh muda lainnya yang melakukan pergerakan melalui media social. Berbeda dengan Ghonim yang memobilisasi masa dengan Facebook, Asmaa Mahfouz menggunakan peran *Youtube* untuk memobilisasi massa. Asmaa memasukkan rekaman video aksi bakar diri yang dilakukan oleh empat orang warga Mesir yang membakar dirinya sendiri sebagai protes terhadap kemiskinan, kelaparan, keterpurukan dan penghinaan yang dilakukan pemerintah ³⁹.

Tabel 2.1: Kronologis Revolusi Mesir

No	Tanggal	Kejadian
1	Selasa, 25-01-2011	Protes Mulai, 'Hari Kemarahan'
2	Rabu, 26-01-2011	Hari Kedua dari protes
3	Kamis, 27-01-2011	Mesir Tutup Internet
4	Juma'at, 28-0-1-2011	Mubarak Berbicara, Akan Membentuk Pemerintahan Baru
5	Sabtu, 29-0-1-2011	Pengguna Internet Mesir Berkomunikasi
6	Minggu, 30-0-1-2011	Hillary Clinton: Mesir Perlu Transisi untuk Demokrasi
7	Senin, 31-0-1-2011	Pemerintah Baru Mesir Diumumkan
8	Selasa, 1-02-2011	Presiden Mubarak, Berjanji Tidak Akan Ikut Pemilu
9	Rabu, 2-02-2011	Mengembalikan Layanan Internet di Mesir
10	Kamis, 3-02-2011	Wartawan Asing Ditangkap
11	Jum'at, 4-02-2011	Protes "Hari Keberangkatan" Mesir
12	Sabtu, 5-02-2011	Anggota dari Partai Mengundurkan Diri
13	Minggu, 6-02-2011	Pemerintah Sepakati Konsesi
14	Senin, 7-02-2011	Eksekutif Google di Mesir
15	Selasa, 8-02-2011	Aktivis Memberi Semangat
16	Rabu, 9-02-2011	Pemogokan Tenaga Kerja Sepanjang Mesir
17	Kamis, 10-02-2011	Meskipun Rumor, Mubarak Tolak untuk Langkah Turun
18	Jum'at, 11-02-2011	Mubarak Mengundurkan Diri sebagai Presiden

Sumber: Apriadi Tamburaka. *Revolusi Timur Tengah*, hal. 76-77

³⁹ Ibid, hal. 119-120

Pada tanggal 25 Januari 2011, masyarakat Mesir melakukan aksi turun ke jalan. Protes tersebut dikoordinasikan oleh para demonstran melalui situs jejaring social *Twitter*. Aksi protes yang dilakukan masyarakat direspon pemerintah dengan memblokir *Twitter* tersebut. Tindakan pemerintah yang demikian tidak hanya membuat masyarakat Mesir marah, tetapi justru menambah peningkatan perhatian nasional terhadap perlawanan anti pemerintah. Selama dua hari berikutnya, (26-27 Januari 2011), polisi anti huru-hara turun ke jalan menangkap dan melukai ratusan orang dengan menggunakan tongkat, gas air mata dan meriam air. Protes yang terjadi tidak hanya di Kairo, ibu kota Negara Mesir, tetapi juga di Alexandria dan Suez, dua kota besar lainnya.

Pada tanggal 27 Januari 2011, sebagai bentuk protes seluruh negeri, pemenang Nobel dan mantan kepala Badan Aton Internasional, El Baradei, kembali ke Mesir dari Wina. Ia menyatakan siap memimpin protes. Mohammad El Baradei, meminta Hosni Mubarak untuk segera turun dari jabatan Presiden karena sudah tidak mampu menciptakan stabilitas keamanan dan menjalankan tugasnya dengan baik. El Baradei juga menyampaikan kesiapannya untuk memegang kontrol pemerintahan transisi jika Mubarak bersedia turun. Demikian pula Ikhwanul Muslimin, lawan lama dari rezim Hosni Mubarak dan secara resmi di larang di Mesir juga turut serta dalam aksi tersebut, terutama tokoh-tokoh muda dari Ikhwanul Muslimin.⁴⁰

Kemudian pada tanggal 28 Januari 2011 pemerintah Mesir memblokir

masyarakat Mesir dalam menggalang dukungan masyarakat. Termasuk akun *Twitter* dan *Facebook*, *e-mail* dan juga outlet jejaring sosial bahkan pesan teks juga diblokir. Kemudian pemerintah mengerahkan pasukan keamanan yang besar ke Kairo. Akibatnya, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan demonstran yang menimbulkan ratusan orang cedera dan puluhan lainnya meninggal⁴¹. Kemudian dalam bentrok yang terjadi antara aparat keamanan dengan demonstran berujung penangkapan terhadap beberapa orang demonstran.

Kondisi yang kacau di Mesir tersebut, ternyata menarik perhatian Amerika Serikat untuk mengambil peran didalamnya, dimana Mesir merupakan sekutu Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, dan Mesir adalah negara penerima bantuan Amerika Serikat terbesar kedua setelah Israel. Dalam ketegangan politik yang terjadi di Mesir tersebut, Barack Obama meminta Mubarak mengambil kebijakan yang kongkrit guna merealisasikan reformasi politik dan menghentikan tindak kekerasan terhadap para demonstran.

Hosni Mubarak mengambil langkah untuk membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan yang baru. Namun para demonstran tidak puas dengan tindakan Mubarak yang hanya berusaha membentuk kabinet baru. Para demonstran tetap menginginkan Mubarak turun dari jabatannya sebagai Presiden.

Pada tanggal 30 Januari 2011, Para warga asing yang berdomisili di Mesir mulai dievakuasi menyusul peningkatan instabilitas. Jumlah demonstran di

⁴¹ Hminews, *18 Hari Revolusi Mesir, Mubarak Tumbang*, <http://hminews.com/news/inilah-kronologi-18-hari-revolusi-mesir>

Bundaran Tahrir, Kairo mencapai puluhan ribu orang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menuntut penyusunan perencanaan di Mesir yang tidak menyebabkan kekosongan kekuasaan. Clinton menyatakan bahwa penentuan wakil presiden tidak cukup. Mendagri Mesir menginstruksikan penempatan pasukan keamanan di seluruh kota Mesir kecuali di Bundaran Tahrir, Kairo. Obama menyatakan mendukung proses peralihan kekuasaan secara damai yang menjawab tuntutan rakyat Mesir. Pemerintah Mesir menutup aktivitas jaringan televisi Aljazeera di Mesir dan menutup transmisi sinyal satelit Nilesat untuk program Aljazeera di sebagian kawasan Timur Tengah ⁴².

Pada tanggal 31 Januari 2011, Hosni Mubarak, menginstruksikan perdana menteri barunya untuk mulai berunding dengan kelompok oposisi dan berupaya menyediakan lapangan kerja baru dan juga untuk mengakhiri inflasi. Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, meminta Mubarak segera berunding dengan kelompok oposisi. Mubarak menunjuk wakilnya, Omar Suleiman untuk berunding dengan seluruh kelompok oposisi guna membicarakan amandemen undang-undang dasar dan reformasi dewan yudikatif.

Pada tanggal 1 Februari 2011, Lebih dari satu juta warga berdemonstrasi di Bundaran Tahrir menyetujui tuntutan berbagai kelompok oposisi yang tetap melanjutkan demonstrasi hingga runtuhnya rezim Mubarak. Hosni Mubarak dalam pidatonya di televisi bersikeras akan mempertahankan jabatannya namun

⁴² Hminews. *18 Hari Revolusi Mesir, Mubarak Tumbang*, <http://hminews.com/news/inilah-kronologi-18-hari-revolusi-mesir-mubarak-tumbang/>

tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. Ia juga menyatakan akan berupaya keras menyerahkan kekuasaan secara damai.

Pada tanggal 2 Februari 2011 demonstrasi kembali berlanjut. Akses internet secara resmi kembali dibuka oleh pemerintah setelah beberapa hari koneksi di potong⁴³. Para demonstran memamerkan demonstrasi akbar di hari Jumat guna memaksa Hosni Mubarak meletakkan jabatannya. Hal tersebut ditanggapi oleh Ketua Parlemen mesir dengan menyatakan akan melakukan sejumlah perubahan dalam undang-undang dasar. Ia juga mengkonfirmasi pembekuan seluruh aktivitas parlemen sampai lembaga ini selesai meninjau protes menyangkut pemilu presiden sebelumnya.

Pada tanggal 3 Februari 2011 terjadi penembakan warga di Bundaran Tahrir yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata pro-Mubarak. Menanggapi hal tersebut aparat keamanan menginstruksikan kepada wartawan agar meninggalkan hotel-hotel di Bundaran Tahrir agar tidak terjadi penembakan berikutnya⁴⁴.

Pada tanggal 5 Februari 2011, delegasi khusus Amerika Serikat, Frank Wisner berkunjung ke Mesir dan menyatakan bahwa, dalam kondisi Mesir yang bergejolak tersebut Mubarak harus tetap bertahan di kekuasaan untuk mengatur perubahan ideal dalam proses transisi kekuasaann secara damai. Kemudian Mubarak bersidang dengan para menteri ekonomi, perdagangan, dan perminyakan di kabinet barunya.

⁴³ Apriadi Tamburaka, Op Cit. hal. 82

Pada tanggal 10 Februari 2011, Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir menggelar sidang tanpa kehadiran Hosni Mubarak dan merilis deklarasi nomor satu dan tetap menyelenggarakan sidang berkelanjutan untuk mengontrol kondisi Mesir. Disisi lain Sekitar tiga juta demonstran berkumpul di Bundaran Tahrir, di jembatan-jembatan dan tempat-tempat umum menuntut pengunduran diri Mubarak. Hal tersebut masih di respon Mubarak dengan menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari kekuasaan sampai masa tugasnya berakhir, dan menyerahkan wewenang kepada wakilnya Omar Suleiman.

Kemudian Suleiman berusaha meyakinkan rakyat Mesir bahwa Mubarak berkomitmen untuk melimpahkan kekuasaan secara damai dan bertindak berdasarkan undang-undang dasar. Oleh karena itu, Suleiman berharap agar para demonstran segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan Sualiman. Para demonstran justru mengamuk dan semakin bertekad untuk menggulingkan rezim diktator Hosni Mubarak.

Pada tanggal 11 february 2011 terjadi puncak perjuangan masyarakat Mesir dalam menggulingkan rezim otoriter Hosni Mubarak. Pada pukul 16.04 waktu setempat Wakil Presiden Mesir Oman Sulaiman mengabarkan pengunduran diri Hosni Mubarak dari jabatan presiden Mesir. Berita tersebut disampaikan Sulaiman lewat sebuah stasiun televisi di Mesir. Kemudian kekuasaan dialihkan kepada militer.

Seluruh rakyat Mesir bersuka cita merayakan keberhasilan mereka dalam menjatuhkan rezim otoriter Hosni Mubarak sehingga mereka terbebas dari

penindasan, kekerasan dan kesengsaraan yang mereka alami selama Hosni Mubarak menjabat presiden. Dengan berbagai usaha dan pengorbanan banyak akhirnya rakyat Mesir mendapat peluang membangun Negara yang Demokratis sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat.

Pasca tumbangnyarezim Hosni Mubarak, Mesir menuju masa transisi demokrasi. Dimana akan segera diatur dan dilaksanakannya pemilihan umum secara demokratis guna memilih presiden dan parlemen di Mesir. Hal tersebut tentunya akan mengundang banyak golongan untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pemilu yang dilaksanakan segera di Mesir.

Selama 30 tahun kepemimpinan Hosni Mubarak perpolitikan di Mesir tidak berkembang, dikarenakan Mubarak mengendalikan perpolitikan Mesir agar ia dapat terpilih lagi dalam setiap periodenya, termasuk dengan melakukan berbagai kecurangan didalamnya serta dengan mengintimidasi pendukung kontestas oposisi agar memilih ia sebagai presiden